
Analisis Perbandingan Implementasi Kebijakan Layanan Kesehatan di Dua Desa Sumatera Utara

Comparative Analysis of Health Service Policy Implementation in Two Villages of North Sumatera Utara

Diana Silva*, Angel Pitaloka Harahap & Indra Agung Gunawan Sianipar

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Medan, Indonesia

Diterima: 2021-05-24; Direview: 2021-05-24; Disetujui: 2023-06-01

DOI: <https://doi.org/10.34007/iolas.v1i2.157>

*Corresponding Email: dianasilva01@gmail.com

Abstrak

Kesehatan merupakan hal yang paling penting bagi manusia. Dengan adanya kesehatan, manusia dapat menjalankan segala aktivitas. Dalam Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 diamanatkan bahwa pelayanan Kesehatan merupakan salah satu aspek dari hak asasi manusia, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28 H ayat (1): "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara khusus mengenai analisis perbandingan implemementasi kebijakan layanan kesehatan di dua desa Sumatera Utara yaitu desa Paya Gambar dan desa Padang Parsadaan. Data-data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan peneliti dengan menelaah jurnal, laporan atau berita yang memuat layanan kesehatan masyarakat kedua desa tersebut dan dianalisis secara kualitatif. Kebijakan kesehatan dapat dilihat sebagai suatu jaringan keputusan yang saling berhubungan, yang pada prakteknya peduli kepada pelayanan kesehatan masyarakat (Green & Thorogood, 1998).

Kata Kunci: Kebijakan layanan; Kesehatan; Desa

Abstract

Health is the most important thing for humans. With health, humans can carry out all activities. In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is mandated that health services are one aspect of human rights, as stated in Article 28 H paragraph (1): "Everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to have a place to live and to have a good living environment. good and healthy, and have the right to obtain health services. This study examines the comparative analysis of the implementation of health service policies in two North Sumatra villages, namely Paya Gambar village and Padang Parsadaan village. The data in this study used a literature study conducted by researchers by reviewing journals, reports, or news that contained public health services for the two villages and analyzed qualitatively. Health policy can be seen as a network of interrelated decisions, which in practice are concerned with public health services (Green & Thorogood, 1998).

Keywords: Service Policy; Health; Village

How to Cite: Silva, D. Harahap, A.P. & Sianipar, I.A.G. (2024), Analisis Perbandingan Implementasi Kebijakan Layanan Kesehatan di Dua Desa Sumatera Utara, *Journal of Law & Policy Review*. 2 (1): 11 - 20.



PENDAHULUAN

Pelayanan merupakan suatu prestasi yang dilakukan atau dikorbankan agar dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pihak lain. Pengertian yang lain menyatakan bahwa pelayanan adalah sesuatu hal yang dapat menolong, menyambut, membalas, mengindahkan, memuaskan, menghidangkan, menyuguhkan, membantu, menanggapi, menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan atau sesuatu hal yang diperlukan oleh pihak lain (Syafii, 2017). Pelayanan publik adalah segala aktivitas yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta dalam mendistribusikan barang atau jasa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat atau warga Negara (Panjaitan et al., 2019; Rivanmeta et al., 2022; Rohayatin et al., 2022).

Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang tidak kasat mata yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta dalam memberikan, mendistribusikan barang dan jasa kepada masyarakat dalam rangka memenuhi segala kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat serta memecahkan permasalahan yang terdapat pada konsumen atau masyarakat (Simangunsong, 2015; Suryani & Suharyanto, 2016; Yusriadi, 2018).

Kesehatan merupakan hal yang paling penting bagi manusia. Dengan adanya kesehatan, manusia dapat menjalankan segala aktivitas. Menjaga kesehatan diri dapat dilakukan dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan agar tidak timbul penyakit yang dapat menyerang. Selain itu, pemerintah telah memberikan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terserang penyakit. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, kesehatan diartikan sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomis (Azwar et al., 1994). Menurut Levey Loomba, pelayanan kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi baik secara sendiri atau bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan perseorangan, kelompok dan ataupun masyarakat (Azwar et al., 1994).

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang didalamnya terdapat kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri. Desa juga merupakan elemen terkecil dalam sistem pemerintahan yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Batubara, 2013; Kusmanto, 2013).

Kebijakan kesehatan merupakan kebijakan publik. Konsep dari kebijakan publik dapat diartikan sebagai adanya suatu negara yang kokoh dan memiliki kewenangan serta legitimasi, di mana mewakili suatu masyarakat dengan menggunakan administrasi dan implementasi dalam mengatur kebijakan. Kebijakan adalah suatu konsensus atau kesepakatan terhadap suatu persoalan, di mana sasaran dan tujuannya diarahkan pada suatu prioritas yang bertujuan, dan memiliki petunjuk utama untuk mencapainya (Sianturi et al., 2022; Suharyanto, 2016; Wibowo et al., 2023). Tanpa ada kesepakatan dan tidak ada koordinasi akan mengakibatkan hasil yang diharapkan sia-sia belaka. Kesehatan didefinisikan sebagai suatu cara atau tindakan yang berpengaruh terhadap perangkat institusi, organisasi, pelayanan kesehatan dan pengaturan keuangan dari sistem Kesehatan, kebijakan kesehatan merupakan bagian dari sistem kesehatan (Astari, 2020; Azwar et al., 1994; Massie, 2009).

Kebijakan kesehatan bertujuan untuk mendisain program-program di tingkat pusat dan lokal, agar dapat dilakukan perubahan terhadap determinan-determinan Kesehatan (Silalahi et al., 2021). Kebijakan kesehatan adalah suatu hal yang peduli terhadap pengguna pelayanan kesehatan termasuk manajer dan pekerja kesehatan. Kebijakan kesehatan dapat dilihat sebagai suatu jaringan keputusan yang saling berhubungan, yang pada prakteknya peduli kepada pelayanan kesehatan masyarakat (Green & Thorogood, 2017). Kebijakan-kebijakan kesehatan dibuat oleh pemerintah dan swasta. Kebijakan merupakan produk pemerintah, walaupun

pelayanan kesehatan cenderung dilakukan secara swasta, dikontrakkan atau melalui suatu kemitraan, kebijakannya disiapkan oleh pemerintah dimana keputusannya mempertimbangkan juga aspek aspek politik pemerintah (Buse et al., 2005). Jelasnya kebijakan kesehatan adalah kebijakan publik yang merupakan tanggung jawab pemerintah dan swasta. Sedangkan tugas untuk menformulasi dan implementasi kebijakan kesehatan dalam satu negara merupakan tanggung jawab Departemen Kesehatan (WHO, 2000).

Salah satu bentuk penyelenggaraan upaya kesehatan di desa dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan pos kesehatan desa (Poskesdes). dimana lembaga ini adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang berfungsi sebagai wadah bagi kesehatan masyarakat desa. Poskesdes siap melayani segala keluhan masyarakat mengenai kesehatan desa sebelum penanganan lebih lanjut ke puskesmas lalu ke rumah sakit. Puskesmas, Puskesmas merupakan pusat pembangunan masyarakat serta menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang bermutu, merata, terjangkau dengan peran masyarakat secara aktif tuntutan masyarakat terhadap pemanfaatan Puskesmas semakin kompleks sebagai dampak positif kemajuan ilmu untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya melaksanakan pelayanan kesehatan yaitu setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.

Penelitian kesehatan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan bukti yang akurat. Setelah dilakukan penelitian kesakitan dan penyakit dari masyarakat, termasuk kebutuhan akan kesehatan, sistem kesehatan, tantangannya selanjutnya adalah mengetahui persis penyebab dari kesakitan dan penyakit itu. Walaupun disadari betapa kompleksnya pengertian yang berbasis bukti untuk dijadikan dasar dari kebijakan (Fafard, 2008).

Dengan demikian, atas dasar latar belakang tersebut dan melihat pentingnya Kebijakan Layanan Kesehatan, maka tulisan ini menganalisis bagaimana analisis perbandingan implementasi kebijakan layanan kesehatan di dua desa Sumatera Utara yaitu desa Paya Gambar dan desa Padang Persadan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dalam kerangka penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang implementasi kebijakan layanan kesehatan di desa. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang melibatkan membaca dan menelaah berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, laporan resmi, dan berita terkait (Bah et al., 2020). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang isu-isu terkait layanan kesehatan di tingkat desa.

Hasil pengamatan dan analisis data kemudian digunakan untuk menyajikan deskripsi tentang implementasi kebijakan layanan kesehatan di dua desa yang menjadi fokus penelitian. Deskripsi ini mencakup berbagai aspek yang relevan, seperti ketersediaan fasilitas kesehatan, aksesibilitas layanan, kualitas pelayanan, serta tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang kondisi layanan kesehatan di tingkat desa.

Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang praktik dan tantangan dalam implementasi kebijakan layanan kesehatan di desa. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan kebijakan dan perbaikan sistem layanan kesehatan di tingkat desa, serta menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Implementasi Kebijakan Layanan Kesehatan.

Tentang Kesehatan menyatakan bahwa Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam pengertian ini maka kesehatan harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh terdiri dari unsur-unsur fisik, mental dan sosial dan di dalamnya kesehatan jiwa merupakan bagian integral kesehatan. Definisi sakit, seseorang dikatakan sakit apabila ia menderita penyakit menahun (kronis), atau gangguan kesehatan lain yang menyebabkan aktivitas kerja/kegiatannya terganggu. Walaupun seseorang sakit (istilah sehari-hari) seperti masuk angin, pilek, tetapi bila ia tidak terganggu untuk melaksanakan kegiatannya, maka ia dianggap tidak sakit (UU No.23,1992) Manusia adalah faktor kunci keberhasilan dari suatu pembangunan. Untuk menciptakan manusia yang berkualitas diperlukan suatu derajat kesehatan manusia yang prima sehingga dalam hal ini mutlak diperlukan pembangunan kesehatan. Untuk mendukung pencapaian pembangunan kesehatan pemerintah telah menyediakan beberapa sarana fasilitas kesehatan beserta tenaga kesehatannya.

Salah satu fasilitas kesehatan yang banyak dimanfaatkan masyarakat adalah puskesmas. Sebagai ujung tombak pelayanan dan pembangunan kesehatan di Indonesia maka puskesmas perlu mendapatkan perhatian terutama berkaitan dengan mutu pelayanan kesehatan puskesmas sehingga dalam hal ini puskesmas terlebih pada puskesmas yang dilengkapi dengan unit rawat inap dituntut untuk selalu meningkatkan keprofesionalan dari para pegawainya serta meningkatkan fasilitas/sarana kesehatannya untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna jasa layanan kesehatan (Dinik Retnowati, 2010).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 diamanatkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu aspek dari hak asasi manusia, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28 H ayat (1) : “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pelayanan Kesehatan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum sebagai yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kebijakan Pelayanan Kesehatan menjadi salah satu komponen yang utama. Peran penting pembangunan seperti sekarang dapat dilihat dari kontribusinya dalam meningkatkan produktivitas generasi sekarang dan produktivitas pelayanan kesehatan yang akan mendatang (Dwiyanto, 2021b). Di Indonesia, peran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik (Pelayanan Kesehatan) disebutkan dalam UUD 1945 dan pasal 31 bahwa pendidikan dan kesehatan dijamin oleh Negara. Demikian halnya dalam GBHN dan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Sistem Kesehatan Nasional, Hak Dasar Kesehatan di Indonesia dijamin oleh Negara. Kesehatan menjadi salah satu komponen yang utama. Peran penting pembangunan seperti sekarang dapat dilihat dari kontribusinya dalam meningkatkan produktivitas generasi sekarang dan produktivitas pelayanan kesehatan yang akan mendatang (Dwiyanto, 2021a). Di Indonesia, peran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik (Pelayanan Kesehatan) disebutkan dalam UUD 1945 dan pasal 31 bahwa pendidikan dan kesehatan dijamin oleh Negara. Demikian halnya dalam GBHN dan UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Sistem Kesehatan Nasional, Hak Dasar Kesehatan di Indonesia dijamin oleh Negara.

Implementasi kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan, termasuk kebijakan sektor pelayanan kesehatan yang diharapkan berdampak pada kualitas hidup masyarakat, akan tidak semudah yang dibayangkan, hal ini karena beragamnya aspek kesehatan itu sendiri yang kemudian berhadapan dengan berbagai publik interst sejak policy proses berlangsung, tetapi juga perubahan arah kebijakan sering terjadi pada setiap periode pergantian kepemimpinan termasuk instabilitas politik pasca oder baru.

Perbandingan Implementasi Kebijakan Layanan Kesehatan Di Dua Desa Sumatera Utara. Desa Paya Gambar

Desa Paya Gambar merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kepala desa Paya Gambar adalah bapak Viktor Silaban. Diketahui bahwa desa Paya Gambar berada di Kabupaten Deli Serdang, yakni merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara dan secara administrasi berbatasan langsung dengan Kota Medan. Kabupaten Deli Serdang adalah wilayah hinterland dari Kota Medan, sehingga perkembangan wilayahnya pun sebagian besar dikarenakan adanya pengaruh yang ditimbulkan dari perkembangan Kota Medan. Namun, pada saat ini yang menjadi salah satu faktor penyebab berkembangannya Kabupaten Deli Serdang dikarenakan adanya pembangunan Bandara Internasional Kuala Namu yang merupakan rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan untuk menggantikan fungsi Bandara Internasional Polonia Medan.

Keberadaan Bandara mendorong adanya pembangunan infrastruktur untuk melayani aktifitas dari dan menuju bandara. Oleh karena itu, berkembangnya fungsi transportasi udara kemudian juga meningkatkan keuntungan non penerbangan di kawasan operasional bandara maupun di kawasan sekitar bandara. Keuntungan non penerbangan ini seperti adanya hotel, perumahan, perkantoran, pendidikan, dan hiburan, bahwa fasilitas non penerbangan di kawasan sekitar bandara yang mendatangkan keuntungan tersebut ditujukan untuk pengguna bandara yang memiliki mobilisasi tinggi dan tidak mau membuang waktu untuk perjalanan dari dan menuju bandara.

Dengan adanya Bandara Kuala Namu, ketersediaan fasilitas sosial dan ekonomi di Kecamatan Batang Kuis meningkat. Hal tersebut terlihat di desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis ini terdapat perkembangan fasilitas pusat pertokoan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas peribadatan. Pembangunan dan kompleksitas aktivitas dalam suatu lingkungan permukiman dan permukiman akan mempengaruhi kondisi sarana prasarana (Budiarjo, 2008).

Desa Paya Gambar juga memiliki fasilitas kesehatan terdiri dari Di Kecamatan Batang Kuis terdapat puskesmas 1 (satu) unit, dan puskesmas pembantu 4 unit. Selain itu juga terdapat pos kesehatan desa sebanyak 7 unit. Untuk memaksimalkan layanan kesehatan kepada masyarakat pemerintah daerah juga telah menyediakan fasilitas layanan sistem mobile, yakni patroli kesehatan baik dengan menggunakan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) masing-masing jumlahnya 1 unit dan 12 unit.

Sejak awal tahun 2020, Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak disrupsi dengan dampak yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Tentu dalam konteks kesehatan publik, salah satu aspek yang menerima dampak paling besar adalah ketersediaan pelayanan kesehatan. Mungkin sudah terlampaui sering dijumpai cerita di laman berita maupun sosial media mengenai kondisi fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah mulai kewalahan dalam mengakomodasi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Penyakit virus corona (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular Covid-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis (Alfikri et al., n.d.; Tawai et al., 2021).

Kejadian Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia saat ini telah berdampak pada berbagai sektor kesehatan maupun nonkesehatan. Masing-masing negara menyikapinya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka memutus mata rantai penularan dan mengurangi dampak yang terjadi. Kekuatan sistem kesehatan nasional kita pun saat ini diuji seiring dengan eskalasi kasus Covid-19 yang telah melanda seluruh provinsi di Indonesia. Fasilitas pelayanan kesehatan menjadi garda terdepan dalam menghadapi masalah kesehatan di masyarakat akibat Covid-19. Puskesmas yang selama ini menjadi ujung tombak

pelayanan kesehatan untuk menjangkau masyarakat di wilayah kerjanya semakin penting perannya untuk penanggulangan Covid-19 (Boin et al., 2021).

Peran Puskesmas perlu diperkuat dalam hal prevensi, deteksi dan respon sesuai dengan kewenangannya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Namun di sisi lain, Puskesmas juga memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal bagi masyarakat yang tidak boleh ditinggalkan selama masa pandemi ini berlangsung.

Diketahui bahwa Sebanyak 21 tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), terkonfirmasi positif Covid-19. Sebelumnya para nakes tersebut sudah menjalani vaksinasi 2 tahap pada Januari 2021. Kepala UPT Puskesmas Rawat Inap Batang Kuis, Jalan Pancasila, Kecamatan Batang Kuis, Deli Serdang, dr Aguswan mengatakan, vaksinasi diwajibkan kepada semua nakes yang ada di puskesmas tersebut. "21 tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif Covid-19 bergejala ringan dan tanpa gejala. Paling berat batuk flu dan hilang penciuman."

Hasil tes swab Polymerase Chain Response (PCR) terhadap keluarga dari 21 tenaga kesehatan di UPT Puskesmas Rawat Inap Batang Kuis, 1 anak bidan positif Covid-19. Sebelumnya, hasil tes swab Polymerase Chain Response (PCR) terhadap keluarga dari 21 tenaga kesehatan di UPT Puskesmas Rawat Inap Batang Kuis, 1 anak bidan positif Covid-19. Sedangkan yang lainnya masih menunggu keluarnya hasil tes swab. Diterangkan Aguswan, pihaknya telah melakukan tes swab massal terhadap 76 nakes di Puskesmas Rawat Inap Batang Kuis. Kemudian diketahui hasilnya 21 orang terkonfirmasi positif Covid-19.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM Unimed) melakukan sosialisasi Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) dengan mengembangkan inovasi fasilitas kebersihan masyarakat dalam bentuk pencuci tangan tanpa sentuh -(Untouch hand washer type mobile) bagi masyarakat Desa Paya Gambar Kecamatan Batangkuis. Modifikasi pengembangan fasilitas tersebut bekerjasama dengan kepala Workshop Pemesinan dan Fabrikasi Logam Fakultas Teknik Unimed Bisrul Hapis Tambunan, ST., M.T. Selama satu bulan terakhir telah dilaksanakan pendampingan, sosialisasi, pembagian masker, pembuatan poster, dan pemberian fasilitas pencuci tangan tanpa sentuh kepada masyarakat dengan dukungan dana hibah kompetisi pengabdian dari BOPTN Universitas Negeri Medan.

Tim Pengabdian Unimed yang melakukan pendampingan dalam program pengabdian masyarakat tersebut adalah Dr. Darwin, ST., M,Pd sebagai ketua dan didukung oleh anggota Dr. Dwi Wahyuni Nurwihastuti, S.Si., M.Sc; dan Dr. Yuniarto Mujisusatyo, M.Pd. Dr. Darwin kepada reporter Humas mengatakan "kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan penyebaran virus Corona (covid-19) di lingkungan masyarakat dan pencegahan dalam pola klaster keluarga. Pemberian 3 unit fasilitas pencuci tangan tanpa sentuh kepada masyarakat ditempat pada lokasi-lokasi kegiatan umum desa, yaitu di luar pintu masuk kantor desa, di pelataran Masjid Baiturrahman, di pelataran Gereja HKPB desa Paya Gambar." Kegiatan pengabdian masyarakat ini didukung penuh oleh Kepala desa Paya Gambar Viktor Silaban dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Alibonar Siregar, dukungan empat kepala dusun serta masyarakat, secara keseluruhan kegiatan telah berjalan dengan baik dan lancar. Aparat desa dan masyarakat mengikuti kegiatan dengan serius dan antusias karena materi dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan mendasar masyarakat desa.

Kepala desa Paya Gambar Viktor Silaban mengatakan "Pemerintahan desa dan masyarakat sangat berterima kasih kepada pihak LPPM Unimed dan khususnya kepada Tim Pengabdian yang telah melakukan pendampingan dan sosialisasi upaya pencegahan penyebaran virus corona covid-19". Menurut Ketua LKMD Alibonar Siregar mengatakan bahwa "Kegiatan pengabdian ini meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan secara mandiri atas bencana pandemi covid-19". Dampak akhir kegiatan ini adalah diharapkan masyarakat desa Paya Gambar dapat dengan konsisten menerapkan protocol kesehatan dan menurunnya angka terpapar covid di Kabupaten Deli Serdang dan khususnya di desa Paya Gambar.

Desa Padang Parsadaan

Padang Parsadaan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pangribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Desa Padang Parsadaan terletak pada ujung Tapanuli Utara tepatnya berdekatan dengan perbatasan Tapanuli Selatan. Implementasi kesehatan di desa Padang Parsadaan saat ini dapat dikatakan meningkat, dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Meski peningkatannya tidak semaksimal mungkin. Hal ini dapat dikatakan dari pembuktian pelayanan tenaga kesehatan, tenaga kesehatan di Desa Padang Parsadaan menjalankan pelayanan sesuai program-program yang diadakan.

Adapun contoh pelayanan yang sudah berjalan dengan baik adalah sebagai berikut:

1. Terkait adanya wabah Covid-19 sehingga adanya penanganan bidang kesehatan terhadap masyarakat desa, yang dimana tenaga kesehatan beserta perangkat-perangkatnya berperan aktif dalam memutuskan rantai Covid-19, pencegahan dengan cara menyemprot pekarangan lingkungan desa serta rumah, kemudian selalu mengingatkan masyarakat untuk mematuhi kesehatan protokol, selanjutnya memberikan masyarakat desa vitamin ataupun kekebalan tubuh supaya tidak mudah terserang penyakit. Tenaga kesehatan beserta perangkat desa mengadakan penambahan makanan bergizi kepada masyarakat desa dengan memberikan telur kampung kepada setiap orang ada juga jamu, bandrek serta bubur hal ini dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan terhadap masyarakat desa. Selanjutnya pengadaan vaksinasi yang dimana setiap orang berhak untuk di vaksin, vaksin ini diakan untuk mematuhi aturan pemerintah serta untuk kesehatan masyarakat desa sendiri. Proses vaksin di desa Padang Parsadaan sudah dapat dikategorikan baik.
2. Kemudian tenaga kesehatan di desa Padang Parsadaan mengadakan kesehatan terhadap lansia yang dimana setiap hari sabtu tenaga kesehatan mengadakan senam sehat olahraga terhadap lansia serta memberi makanan tambahan kepada lansia.
3. Selanjutnya berjalannya program imunisasi terhadap balita/ bai dibawah umur 5 tahun.
4. Dan yang terakhir proses pelayanan tenaga kesehatan terhadap para pasien sudah baik.

Fasilitas kesehatan di desa Padang Parsadaan, adapun fasilitas tersebut yaitu, terdapat 1 puskesmas dan 1 posyandu. Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Indeks pembangunan manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan.

Perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu puskesmas yang diperkuat dengan puskesmas pembantu dan puskesmas keliling, telah didirikan di hampir seluruh wilayah Indonesia, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala.

Dalam kondisi keterjangkauan fasilitas yang masih belum merata menjadi faktor yang mempengaruhi kesehatan di desa Padang Parsadaan. Program terutama bekerja untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan kapabilitas organisasi masyarakat sipil yang bekerja di isu kesehatan masyarakat, baik pada aspek manajemen kelembagaan maupun pada kemampuan organisasi dalam memberdayakan dan memobilisasi komunitas populasi kunci; mendorong terbangunnya sistem perencanaan dan penganggaran terpadu pada tingkat kabupaten, dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program dukungan kesehatan out sendiri. Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kesehatan di desa Padang Parsadaan adalah :

1. Fasilitas yang kurang memadai
2. Ekonomi yang tidak stabil
3. Tingkat karakter dan pemikiran yang masih polos

Peran dan Fungsi Pokok Layanan Kesehatan Puskesmas.

Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping

memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok, juga meningkatkan status kesehatan masyarakat (Depkes, RI 1991).

1. Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
2. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup.
3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Puskesmas harus bisa menyakinkan masyarakat akan pentingnya kesehatan, memperoleh dukungan mereka, dan jika perlu mendorong agar mengubah segala kebiasaan dan perilaku yang dapat mengganggu kesehatan. Selain itu, mereka harus memotivasi peran serta masyarakat dalam bermacam kegiatan kesehatan. Disamping itu, puskesmas sebagai focus interaksi telah meniadakan golongan sosial-ekonomi tertentu seperti biasanya terjadi dalam pertemuan, yang sebagian besar dihadiri oleh golongan masyarakat yang berstatus sosial-ekonomi relative tinggi. Masyarakat dari kelas sosial-ekonomi rendah terlalu sibuk bekerja sehingga tidak mempunyai kesempatan mendapatkan pengetahuan baru. Kadang-kadang mereka diberitahu secara tidak langsung melalui kader kesehatan atau pejabat desa yang hadir dalam pertemuan. Namun informasi yang disampaikan sering kurang lengkap dan akurat. Mengingat masyarakat yang berstatus sosial ekonomi rendah adalah pihak yang paling membutuhkan pelayanan kesehatan, perlu ditemukan strategi yang tepat untuk menginformasikan mereka secara langsung, pemanfaatan interaksi penyedia pelayanan-pasien sebagai media pendidikan kesehatan cukup strategiskarena memungkinkan pemberian informasi yang berulang-ulang. Kedatangan pasien ke puskesmas untuk diobati atau menemani keluarga merupakan waktu yang tepat. Bila penjelasan mengenai kesehatan diberikan pada saat pasien setiap kali kunjungan ke Puskesmas, maka pemahaman akan lebih mendalam di bandingkan dengan satu kali pengajaran saja. Kenyataannya pelayanan yang ada di Puskesmas tidak dimanfaatkan sebagai alternatif untuk mendidik masyarakat. Pendidikan kesehatan juga harus mendapatkan tempat dalam kegiatan rutin puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dengan memiliki akses terhadap informasi, masyarakat akan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pelayanan kesehatan dengan menuntut perbaikan ketika di perlukan. Oleh karena itu, apabila kita menginginkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat maka kita harus bersedialan mampu mnegubah perilaku masyarakat.

Dalam bidang kesehatan, tugas ini merupakan tugas dari tenaga kesehatan yang berada di puskesmas sebagai pendidik atau penyuluh kesehatan (health educator) Pada hahikatnya pengembangan tenaga kesehatas adalah proses pembangunan yang bersifat multidisiplin, lintas sektoral serta lintas program untuk meratakan dan meningkatkan mutu tenaga kesehatan, melalui 3 usaha pokok yaitu penyusunan rencana dan kebijakan, pendayagunaan, serta pendidikan dan pelatihan (Depkes, RI 2009).

SIMPULAN

Kebijakan kesehatan adalah suatu hal yang peduli terhadap pengguna pelayanan kesehatan termasuk manajer dan pekerja kesehatan. Kebijakan kesehatan dapat dilihat sebagai suatu jaringan keputusan yang saling berhubungan, yang pada prakteknya peduli kepada pelayanan kesehatan masyarakat (Green & Thorogood, 2017). Adanya Bandara Kuala Namu, ketersediaan fasilitas sosial dan ekonomi di Kecamatan Batang Kuis meningkat. Hal tersebut terlihat di desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis ini terdapat perkembangan salah satunya fasilitas layanan kesehatan. Serta LPPM Unimed dan khususnya kepada Tim Pengabdian yang telah melakukan pendampingan dan sosialisasi upaya pencegahan penyebaran virus corona covid-19 saat ini di desa Paya Gambar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan secara mandiri atas bencana pandemi Covid-19. Sedangkan layanan kesehatan di desa Padang Parsadaan masih belum memadai, dengan demikian cara mengatasinya dengan meningkatkan pembangunan fasilitas puskesmas dan posyandu agar pelayanan dapat berjalan baik, kemudian



terkait krisinya ekonomi pemerintah setempat memberikan dana tambahan supaya dapat terjangkau dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfikri, M., Sumanti, S. T., Rasyid, A., Azhar, A. A., Abidin, S., & Suharyanto, A. (n.d.). *An Effects of Social Media on High School Students during the Covid-19 in Indonesia*.
- Astari, R. Y. (2020). *Mutu pelayanan kebidanan dan kebijakan kesehatan*. Deepublish.
- Azwar, A., Francisco, M., & Macdonald, P. (1994). The quality assurance program in Indonesia. *QA Brief*, 3(2), 16–18.
- Bah, Y. M., Ridwan, M., Suharyanto, A., & Amal, B. K. (2020). *Social Work Research*. Medan: Bircu Publisher.
- Batubara, B. M. (2013). Hubungan Komunikasi Badan Perwakilan Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 1(1), 76–87.
- bin Ahmad, A. (1987). *Hikayat seri rama*. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.
- Boin, A., Mcconnell, A., & Hart, P. 't. (2021). Governing the Pandemic: The Politics of Navigating a Mega-Crisis. In *Palgrave*.
- Budiarjo, miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia.
- Buse, K., Mays, N., & Walt, G. (2005). Understanding public health. *Making Health Policy*, 288.
- Dinik Retnowati, D. (2010). *KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS BRINGIN KABUPATEN SEMARANG*. Faculty of Social And Political Science.
- Dwiyanto, A. (2021a). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. UGM PRESS.
- Dwiyanto, A. (2021b). *Teori Administrasi Publik dan Penerapannya di Indonesia* (2nd ed.). Gadjah Mada University Press.
- Fafard, P. (2008). *Evidence and healthy public policy: Insights from health and political sciences*. Citeseer.
- Green, J., & Thorogood, N. (2017). *Analysing health policy: A sociological approach*. Routledge.
- Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 1(1), 39–47.
- Massie, R. G. A. (2009). Kebijakan kesehatan: proses, implementasi, analisis dan penelitian. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 12(4), 409–417.
- Panjaitan, E., Dewi, R., & Angelia, N. (2019). *Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas The Role of the Village Government in Improving the Quality of Administrative Services to the Community*. 8(1), 32–38.
- Rivanmeta, P., Isnaini, I., & Turnip, K. (2022). Implementasi Pelayanan Keprotokolan bagi Walikota dan Wakil Walikota di Pemerintah Kota Binjai. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 509–521. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1247>
- Rohayatin, T., Subagyo, A., Setiawan, A., Munawaroh, S., & Wulandari, W. (2022). Bureaucratic Reform Strategy In Improving The Quality Of Public Services By Implementing Bureaucratic Communication Model in Cimahi City. *Perspektif*, 11(3), 963–969. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6264>
- Sianturi, I. B., Kadir, A., & Nasution, I. (2022). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Anak Putus Sekolah di UPT. Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan*, 1(1), 22–30. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v1i1.776>
- Silalahi, B. A., Sihombing, M., & Isnaini. (2021). Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr . RM . Djoelham Binjai Analysis of Implementation of The Financial Managem. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1) 2021: 1-13, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.518>
- Simangunsong, F. (2015). Kajian Penggalan Potensi dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 3(1), 37–49.
- Suharyanto, A. (2016). Surat Kabar Sebagai Salah Satu Media Penyampaian Informasi Politik pada Partisipasi Politik Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 6(2), 123. <https://doi.org/10.31289/jap.v6i2.1051>

- Suryani, A. I., & Suharyanto, A. (2016). Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kesehatan di Rumah Sakit Umum Sibuhuan. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4(1), 86–99.
- Syafii, M. (2017). *Penerapan denda pelayanan atas keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan pada Perpres no. 19 tahun 2016 ditinjau berdasar teori masalah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Tawai, A., Suharyanto, A., Putranto, T. D., De Guzman, B. M. N., & Prastowo, A. A. (2021). Indonesian covid-19 issue on media: review on spiral of silence application theory. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 5(2), 286–301. <https://doi.org/10.25139/jsk.v5i2.3758>
- Wibowo, D. E., Zulyadi, R., & Ramadhan, M. C. (2023). Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Mengatasi Aksi Terorisme di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3075–3088. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1744>
- Yusriadi, Y. (2018). Reformasi Birokrasi Indonesia: Peluang dan Hambatan. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 8(2), 178–185.